

## Gerakan Menghabiskan Anggaran

Agaknya aneh, di tengah-tengah semangat memberantas korupsi, terjadi pula gerakan menghabiskan anggaran dan bukan sebaliknya, penghematan. Anggaran harus habis. Kalau terpaksa sisa, maka sisa itu harus kembali ke kas negara. Sementara itu, pengembalian ke kas negara dianggap rugi.

Oleh karena itu, masing-masing instansi pemerintah lebih memilih menghabiskannya. Apalagi, jika sisa anggaran itu masih terlalu besar, maka pimpinan instansi yang bersangkutan dianggap kurang hebat dan atau kurang berprestasi. Atas dasar alasan itu, , maka sebisa-bisa, anggaran harus habis. Kalau pun sisa, maka jangan sampai banyak-banyak.

Ukuran kesuksesan bagi para birokrat seperti itu, maka disadari atau tidak, mendorong mereka melakukan apa saja yang sekiranya bisa menyerap anggaran. Kegiatan apa saja dilakukan, asalkan bisa dipertanggung jawabkan. Misalnya, menyelenggarakan seminar, workshop, pelatihan, evaluasi kegiatan dan atau apa lagi lainnya yang sekiranya anggaran dimaksud bisa dibelanjakan.

Masih dalam niatan agar dana yang tersedia habis, maka kegiatan yang dilakukan boleh ditempatkan di hotel mewah, sekalipun sebenarnya instansinya memiliki fasilitas sendiri. Berhemat dianggap tidak perlu. Toh semua itu bisa dipertanggung jawabkan. Ruang pertemuan, kamar, biaya transport, uang saku, tas, dan lain-lain dibiayai dari anggaran itu. Apapun yang dilakukan akan dibenarkan, asal biaya dimaksud bisa dipertanggung jawabkan. Artinya, ada bukti-bukti fisik pembelanjaan itu. Misalnya, ada kuitansi, daftar hadir bagi orang yang terlibat, dan lain-lain.

Pemeriksa keuangan negara biasanya tidak sampai menanyakan alasan atau urgensi kegiatan dimaksud. Yang diperlukan adalah ada proposal, bukti fisik kegiatan, dan laporan keuangannya. Itulah sebabnya, tidak jarang ada jenis kegiatan yang seolah-olah dipaksakan pelaksanaannya.

Kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu urgen tersebut, tidak akan masuk bagian dari korupsi. Padahal bisa jadi kegiatan itu hanya bersifat mengada-ada. Padahal umpama kegiatan itu tidak dijalankan, sebenarnya tidak mengapa. Bahkan, dilakukan pun tidak selalu menghasilkan sesuatu yang penting. Sebab, niatnya adalah menghabiskan anggaran itu. Mereka melakukan hal itu, oleh karena ingin mendapatkan untung dan sekaligus memenuhi tuntutan prosentase anggaran yang berhasil diserap.

Orientasi menghabiskan anggaran seperti cerita tersebut, biasanya tidak dikenal di lembaga swasta. Orang swasta biasanya ukuran keberhasilannya bukan pada seberapa besar tingkat penyerapan anggaran, melainkan pada hasil yang diperoleh. Orang swasta selalu berpikir efektif dan efisien atau untung atau rugi. Besar sisa anggaran tidak mengapa, asalkan target yang diinginkan tercapai. Bahkan makin banyak anggaran yang bisa disisakan semakin baik, dan begitu pula sebaliknya bagi pejabat pemerintah.

Itulah sebabnya, lembaga-lembaga swasta lebih maju dibanding yang diurus oleh birokrasi pemerintah. Contoh kecil, angkutan umum yang dikelola oleh swasta lebih berpotensi tahan

hidup dan bahkan berkembang. Bandingkan dengan pelayanan masyarakat yang dikelola oleh birokrasi pemerintah, ternyata banyak yang kurang memuaskan dan bahkan rentan bankrut. Terkecuali hal itu adalah layanan masyarakat yang dikelola sebagaimana yang dilakukan oleh swasta. Misalnya, akhir-akhir ini adalah bank pemerintah. Manajemen seperti itu disebut dengan istilah *entrepreneur birokrasi*.

Sementara ini rupanya, konsep *entrepreneur birokrasi* masih belum dipercaya sepenuhnya. Artinya belum diterapkan di berbagai instansi, termasuk di lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah. Akhir-akhir ini muncul konsep BLU. Pada awalnya, konsep ini seperti lebih memberi fleksibilitas pada pimpinan instansi pemerintah, namun pada kenyataannya tidak jauh berbeda dari sistem konvensional.

Selama ini, pemerintah dalam mengelola keuangan lebih memilih pendekatan konvensional. Masing-masing instansi diberi anggaran sejumlah tertentu dan dirinci hingga penggunaannya. Menyalahi aturan itu, sekalipun sebenarnya menguntungkan negara, dianggap salah, dan bahkan harus mengembalikan ke kas negara. Kreatif dalam penggunaan anggaran pemerintah tidak dibenarkan. Dalam keadaan seperti ini, maka yang terpenting adalah mengikuti aturan. Apakah hal itu menguntungkan atau tidak, maka tidak perlu dipikirkan. Menghabiskan anggaran di akhir tahun, sekalipun tidak ada untungnya bagi pemerintah, tetap dibolehkan. Anehnya, sekalipun merugikan pemerintah tidak disebut sebagai tindakan menyimpang atau korup.

Merenungkan hal itu semua, saya berkesimpulan bahwa diatur seperti apapun, manusia bisa menyimpang. Manusia bisa berpura-pura, berkamuplase, dan atau berbuat seolah-olah. Cara tepat mengatur manusia tidak cukup dengan peraturan, sekalipun hal itu adalah perlu. Yang lebih penting dari itu adalah menyentuh hati, niat atau mental yang menjalankan peraturan itu. Manakala hati mereka baik, lurus dan jernih, maka penyimpangan itu tidak akan terjadi. Sayangnya, pendekatan tersebut belum mendapatkan perhatian pemerintah. Akibatnya, gerakan menghabiskan anggaran pun masih dianggap benar. Buktinya, hal itu dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, sehingga menjadikan hotel-hotel penuh, disewa oleh para birokrat untuk menghabiskan anggaran itu. *Wallahu*